

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Adi, R. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ayza, B. 2017. *Hukum Pajak Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Ensiklopedia Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Basuki, Y. R. 2017. *Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.
- Cahyani, T. D. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*. Malang: UMM Press.
- Feka, M., Masturi, R., Citranu., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., & Ramadhansyah, D. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adityabakti.
- Nursya. 2019. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: CV. Alungada Mandiri.
- Ramdhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Setiyawan, W. B. M., Bariah, C., Surasa, A., Sitanggang, C. E. P., & Manullang, H. 2023. *Hukum Pidana Korupsi*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifudin, A. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.

Syauket, A., & Wijarnako, D. S. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. Skripsi, Tesis, Jurnal, Dan Karya Ilmiah Lainnya.

Abimanyu, A., Natakusuma, M. T., & Putri, A. N. (2024). Kajian Literatur: Peran E-Budgeting Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi (Studi Empiris di Pulau Jawa). *In Prosiding Seminar Teknologi, Akuntansi, Bisnis, dan Komunitas*.

Anggraini, N. 2018. *Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Peradilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)*. Universitas Brawijaya Indralaya.

Bawono, B. T. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum*.

Bilqis, D. R. 2025. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)*. Universitas Batanghari Jambi.

Kusumastuti, E. 2018. Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. *Jurnal Yuridika*.

Laia, A., & Purwanto. 2023. Kebenaran dan Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*.

Lamijan. 2014. Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan). *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

Marpaung, B. 2022. Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Nalar Keadilan*.

Noviantama, D., Ardhi, M. H. M., & Permana, W. P. N. 2024. Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasari Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK. *Lex Renaissance*.

- Pardede, M. 2020. Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan. *Junal Penelitian Hukum*.
- Pratiwi, A., & Arif, R. 2019. Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia: Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. 2018. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A. 2022. Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Medan Baru. *Legalitas: Jurnal Hukum*.
- Tianto, A. 2018. *Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potesi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Reklamasi Pantai Teluk Jakarta Dengan Tersangka M. Sanusi)*. Universitas Brawijaya Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara dan Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat.

Keputusan Kementerian Perdagangan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

D. Internet/Website

Agus, M. H. S. 2024. Hakim Vonis Bebas Lima Terdakwa Korupsi Pajak Penerangan Jalan. Retrieved Agustus 02, 2025, from aceh.antaranews.com, website: <https://tinyurl.com/29ywpa5e>.

Ahmad, T. 2024. Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe, Empat Terdakwa Dituntut 8 Tahun Penjara. Retrieved December 7, 2024, from acehground.com website: <https://tinyurl.com/mvtn3msp>

Bahri, S. 2025. Jaksa Eksekusi 2 Terdakwa Karus Korupsi PPJ Lhokseumawe, Satu Lagi Sedang Berobat. Retrieved Agustus 17, 2025. From Serambinews.id, website: <https://tinyurl.com/3ussxemm>.

Fernandes, F. 2025. Korupsi Insentif Pajak Penerangan Jalan Lhokseumawe: MA Hukum Mawardi 6 Tahun Penjara, dan Sulaiman 5 Tahun. Retrieved Agustus 02, 2025, from line1.news, website: <https://tinyurl.com/4yh2ku27>.

Fuma, P. Z. 2024. Hasil Audit BPKP, Kerugian Negara Kasus Korupsi PPJ Lhokseumawe Rp 3,1 Miliar, from AJNN.Net. website: <https://tinyurl.com/4e336ykw>.

- Gito. 2023. Kejari Lhokseumawe Tahan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Retrieved Agustus 22, 2025, from Acehportal.com, website: [tps://tinyurl.com/yc67zmpx](https://tinyurl.com/yc67zmpx).
- Gramedia. 2025. Pengertian Deskriptif, Kriteria dan Ciri-Cirinya. Retrieved August 02, 2025, from Gramedia.com, website: <https://tinyurl.com/mst75f3f>.
- Juli, M. 2025. Hakim Vonis Bebas 5 Terdakwa Korupsi PPJ Kota Lhokseumawe. Retrieved Agustus 17, 2025, from Kompasratif.id, website: <https://tinyurl.com/pxr4bu92>.
- Masriadi, & Arief, T. M. V. 2024. Korupsi Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe Rugikan Negara Rp3,1 Miliar. Retrieved December 7, 2024, from Kompas.com website: <https://tinyurl.com/42k6jx35>
- Masriadi., & Maullana, I. 2025. Kasasi Diterima, MA Vonis Dua Eks Pejabat Lhokseumawe Kasus Korupsi PPJ. Retrived Agustus 17, 2024, from Kompas.com, website: <https://tinyurl.com/4suw8hch>.
- Masriadi., & Susanti, R. 2023. Jaksa Ungkap Korupsi Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe. Retrieved Agustus 21, 2025, from Kompas.com, website: <https://tinyurl.com/yn2pwdtm>.
- Mukhtadi, D. 2025. Jaksa Eksekusi Dua Terpidana Korupsi Insentif Pemungutan PPJ Lhokseumawe. Retrived Agustus 02, 2025, from <https://tinyurl.com/bdejmsvf>.
- Syahputra, D. 2023. Jaksa Sita Puluhan Dokumen Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lhokseumawe. Retrieved Agustus 22, 2025, from Voi.id, website: <https://tinyurl.com/2m5y835j>.
- Yani, T. 2024. Deretan Kasus Besar Dalam Dunia Pajak Yang Mengebohkan Publik. Retrieved December 5, 2024, from Mediaindonesia.com website: <https://tinyurl.com/bd9768d7>
- Wahyuni, W. 2022. Tata Cara Penetapan Tersangka. Retrieved Agustus 19, 2025, from Hukumonline.com, website: <https://tinyurl.com/mw996m5b>.
- Zulfurqan. 2023. Kejari Geledah BPKD Lhokseumawe Terkait Dugaan Korupsi Pajak Penerangan Jalan. Retrieved Agustus 21, 2025, from theacehpost.com, website: <https://tinyurl.com/5n95bxvb>.